

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG

Gilmas Septa Anzelbe¹, Nurul Umi Ati², Suyeno³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: gilmasanzelbe9697@gmail.com*

ABSTRAK

Peran atau tanggung jawab pemerintah daerah mengacu pada hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan menurut undang-undang dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya, serta menyelenggarakan segala sesuatu dalam bentuk otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji program kawasan cepat tumbuh yang dilaksanakan di Calanloso. Konsep pengembangan Kawasan Pesat Pertumbuhan Karangploso mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2008 tentang pembangunan daerah melalui pendekatan Pembangunan Kawasan Pesat Pertumbuhan. Pemilihan Karangploso sebagai kawasan dipengaruhi oleh letaknya yang strategis, potensi yang besar dan perkembangan yang tinggi. Secara harfiah, kawasan strategis tumbuh cepat adalah bagian kawasan strategis yang berkembang atau memiliki potensi pengembangan karena keunggulan sumber daya dan kondisi geografisnya, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sekitarnya. Metode penelitian mengaplikasikan analisis kualitatif dan pengumpulan data lewat wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2011), pendekatan penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang berasaskan teori post-positivis untuk mempelajari keadaan sesuatu yang alamiah (bukan eksperimen) dimana pengkaji sebagai alat kunci dan pengutipan sampel data dilakukan dengan sengaja, dan berjalan seperti semakin bertambah. , teknik pengumpulan data dipadukan dengan triangulasi (kombinasi), analisis data berupa induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menitikberatkan pada makna daripada penyamarataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan domain strategi pertumbuhan cepat UMKM di Karangploso Malang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan sumber daya yang tersedia. Hambatan yang dihadapi adalah faktor internal, faktor eksternal dan faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan infrastruktur.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, pengembangan, strategis

Pendahuluan

UU No 25 Tahun 2004 mengenai Struktur Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah sebagai halnya sudah beberapa kali diubah, terakhir pada tahun 2015 perihal Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkenaan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 9 , mensyaratkan: penyusunan dokumen perencanaan strategis jangka menengah daerah yang disebut Perubahan Rencana Strategis. Perubahan Renstra Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang merupakan suatu bentuk dokumen perencanaan yang membantu organisasi mengungkapkan visi dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk mencapainya, menciptakan fokus dan kapasitas organisasi untuk perubahan internal dan eksternal.

Pelaksanaan rencana pertumbuhan pada dasarnya ialah perwujudan tugas pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Artinya pelaksanaan rencana pertumbuhan merupakan

pelaksanaan tugas pelayanan. Sehubungan dengan itu, upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat luas dan peningkatan kesejahteraan sosial yang lebih luas harus diperhatikan dalam pelaksanaan rencana pertumbuhan. Oleh karena itu, salah satu indikator utama untuk melihat/mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu rencana pertumbuhan adalah sejauh mana atau sejauh mana secara langsung atau tidak langsung kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

Kebijakan pertumbuhan yang diterapkan pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang dikembangkan untuk dapat mengelola daerah dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada untuk meningkatkan kondisi daerah dari segi infrastruktur, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan diperlukan proses implementasi yang baik agar kebijakan yang dirumuskan dapat berfungsi sesuai tujuannya (Firdiansyah, 2017).

Pemerintah Kabupaten Malang menjadi salah satu pemerintah wilayah yang menyelenggarakan rencana pertumbuhan. Agenda yang dilaksanakan merupakan program kawasan cepat tumbuh yang dilaksanakan di Karangploso. Konsep ekspansi wilayah Pesat evolusi Karangploso mengacu pada Permendagri No 29 Tahun 2008 tentang pembaharuan wilayah melalui Metode Pengembangan Kawasan Pesat Pertumbuhan. Karangploso dipilih sebagai kawasan karena letaknya yang strategis, potensi yang besar dan tingkat perkembangan wilayah yang tinggi (Malangtimes, 2018).

Landasan hukum lain rencana pembangunan Kawasan Pesat Pertumbuhan Karangploso dan kawasan lain di Kabupaten Malang adalah Peraturan Daerah (Perda) Jatim Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi 2011-2031. Berdasarkan Perda ini, Malang dikembangkan sebagai kawasan metropolitan pertanian regional. Pertumbuhan perkotaannya dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian (malangtimes.com, 2018).

Karangploso menurut geografisnya berbatasan langsung dengan kota Malang dan Batu. Selain itu, lokasinya pada di jalur utama Surabaya-Malang-Batu. Status ini menempatkan Karangploso di bawah tekanan 2 kota berkembang. Hal tersebut, ditambah dengan hadirnya berbagai proyek Perkembangan kawasan tengah, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari, menjadikan Karangploso sebagai kawasan yang terkena dampak langsung. Menurut literal, kawasan strategis yang tumbuh cepat adalah komponen dari wilayah vital yang sedang berkembang ataupun memiliki potensi untuk dikembangkan, lantaran keistimewaan sumber potensi dan kondisi geografis yang mampu mendorong pertumbuhan perniagaan kawasan sekitarnya.

Karangploso memiliki luas kurang lebih 58,47 kilometer persegi dan memiliki kekuatan atau potensi antara lain pariwisata, industri dan pergudangan, peternakan dan pertanian, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan dukungan peningkatan sumber daya manusia setiap tahunnya, maka tingkat pertumbuhannya sekitar 0,11%. Mewujudkan Karangploso sebagai kawasan penyangga dan mendukung rencana kawasan ekonomi strategis seperti KEK Singosari dan Kawasan Metropolitan Pertanian Segitiga Emas (Surabaya-Malang-Batu) (malangtimes.com, 2018)

Kawasan strategis yang tumbuh cepat dicapai dengan meningkatkan dan mengembangkan sumber daya Karangploso yang ada di berbagai bidang. Konsep desa di kawasan Karangploso ini terbagi menjadi dua bagian yakni kawasan cepat tumbuh (Desa Tawangargo, Ngijo, Bocek) serta kawasan bibit tumbuh pesat (Tegalondo, Girimoyo dan Ampeldento). Kedua pemekaran wilayah ini

terkait kuat dengan konsepsi makro dan strategi pembangunannya (Malangtimes, 2018).

Taktik peningkatan wilayah strategis cepat tumbuh didasarkan pada sepasang teori makro yaitu pengalokasian persil selaras kepatutan dan kemampuan sumber daya, pemantauan pertambahan wilayah, peningkatan area pertanian dan optimalisasi fungsi grup bertanam. Sementara itu, strategi peningkatan perniagaan kreatif ialah mewujudkan jaringan dan koneksi di Segitiga serta menciptakan kegiatan baru di wilayah Karangploso. Sedangkan untuk bibit pesat tumbuh, teori makronya ialah sinergi dan kerjasama antar wilayah dan kegiatan. Strategi tersebut bertujuan untuk menyediakan lahan dan fasilitas berupa perumahan, pariwisata dan pertanian, serta infrastruktur pendukung. Selain itu, infrastruktur dan ekonomi telah diperbaiki di bawah strategi pembangunan untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan regional, menyediakan fasilitas dan utilitas, dan memperbaiki sistem limbah ternak dan industri.

Sesuai dengan uraian masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan salah satu proyek yang timbul dari kajian kebijakan publik yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) (Studi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Wilayah Segitiga Emas (Surabaya-Malang-Batu) Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso Kab. Malang?
2. Apakah faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso, Kab. Malang?
3. Apakah faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso, Kab. Malang?

Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan mengenai pelaksanaan Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso Kab. Malang.

2. Untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso, Kab. Malang.
3. Untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso, Kab. Malang.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis
Kajian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penelitian implementasi kebijakan publik di bidang ekonomi Indonesia khususnya di wilayah Karangploso. Saya juga berharap dapat memberikan referensi bagi pembaca, serta bagi mahasiswa yang mungkin melakukan penelitian serupa.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintahan Desa maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota, diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran serta masukan dalam mengambil langkah yang sesuai guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
 - b. Bagi Masyarakat, penelitian ini mampu memberikan gambaran secara transparansi mengenai pengimplementasian kebijakan pada perekonomian masyarakat Karangploso sehingga masyarakat bisa memanfaatkan peluang sebaik-baiknya dengan bijak.
 - c. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat menambah ilmu pengetahuan umum dan sosial serta menambah pengalaman penulis terutama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang tepat sasaran.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan yaitu segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sebagai kesimpulannya, kebijakan publik adalah alternatif-alternatif yang disiapkan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah, pedoman pelaksanaan, tindakan-tindakan tertentu untuk menindaklanjuti strategi yang telah dipilih, menentukan dengan seksama bagaimana pelaksanaannya.

Dalam merumuskan kebijakan, model kebijakan yang dirumuskan oleh Thomas R. Day antara lain: model kelembagaan, model elit, model kelompok, model rasional, model inkremental, model teori

permainan, model pilihan publik, dan model kelembagaan.

Perumusan Kebijakan Publik

Pandangan Dunn (2004: 132) melihat pembuatan kebijakan sebagai pengembangan dan sintesa alternatif pemecahan masalah. Winarno (2008:29) mengemukakan bahwa setiap alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan untuk memecahkan masalah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembuatan kebijakan adalah suatu metode pemecahan masalah yang dibentuk oleh pembuat kebijakan ketika mereka memecahkan masalah yang ada, dan memilih rencana kebijakan yang terbaik di antara sekian banyak alternatif yang ada.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi publik diartikan menjadi realisasi atau praktik, secara lebih sederhana definisi implementasi publik pada kamus Merriam-Webster (Solichin Abdul Wahab, 1997) dinyatakan sebagai “menyediakan sarana pelaksanaan; menghasilkan efek praktis”

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh Abdul Wahap (1997), keputusan kebijakan menggariskan arah pelaksanaan tindakan yang diambil oleh individu/pejabat atau pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Abdul Wahab (1997) mengutip Sabatier (1979) menerangkan konsep implementasi publik sebagai berikut: “Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu rencana dinyatakan efektif atau diberlakukan merupakan fokus dari implementasi kebijakan, yaitu apa yang terjadi dalam proses kebijakan. pelaksanaan Acara dan kegiatan Muncul setelah disetujuinya pedoman kebijakan nasional, termasuk upaya untuk mengelola pedoman tersebut dan memiliki dampak atau pengaruh nyata pada masyarakat atau acara.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk menganalisis program Kawasan pertumbuhan cepat Karangploso di segitiga emas (Surabaya-Malang-Batu) terhadap kesejahteraan masyarakat Karangploso. Penelitian deskriptif yakni studi yang didasarkan pada informasi deskriptif tentang keadaan, situasi, sikap, hubungan, atau sistem pemikiran tentang pokok bahasan penelitian. Selepas memperoleh data yang diperoleh dalam riset ini, langkah selanjutnya ialah mengadaptasi data yang terakumulasi dengan cara mengkaji data, menggambarkan data, dan menarik konklusi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan kumpulan pernyataan. Sistem analisis

data diawali dengan penyiapan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu melalui observasi, wawancara dan pencatatan.

Analisis data pada studi kualitatif dilakukan pada saat dokumentasi data, selepas pemungutan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Selama wawancara, peneliti menganalisis tanggapan responden. Jika jawaban dari wawancara pasca analisis tidak memuaskan, peneliti akan terus mengajukan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu untuk mendapatkan data yang memuaskan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi sebagai topik inti yang akan diteliti. Ini akan membantu peneliti membuat keputusan yang baik tentang data apa yang akan dikumpulkan. Selain itu, fokus penelitian akan memudahkan dalam melakukan penelitian karena penelitian ini memiliki keterbatasan. Penelitian ini memiliki tiga fokus penelitian yaitu :

1. Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di wilayah Segitiga Emas (Surabaya-Malang-Batu) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso.
 - a. Kondisi Lingkungan
 - b. Sumberdaya
2. Dampak yang ditimbulkan dari adanya Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di wilayah Segitiga Emas (Surabaya-Malang-Batu) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Karangploso.
 - a. Faktor Internal
 - b. Faktor Eksternal
3. Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Sarana dan Prasarana

Situs dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 70, Girimoyo, Karangploso, Ngambon, Kec. Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Kecamatan Karangploso karena peneliti melihat banyaknya UMKM yang berkembang di Kecamatan Karangploso ini.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada riset ini mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data pokok penelitian ini yaitu data penelitian yang diperoleh melalui diskusi, pengamatan dan pencatatan terhadap subjek

penelitian yaitu implementasi Rencana Kawasan Pertumbuhan Cepat Karang Ploso di Segitiga Emas (Surabaya-Malang-Batu) dan bagaimana dampak Manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Karangploso. Sedangkan sumber data sekunder adalah literatur dan jurnal ilmiah yang diperoleh dari kegiatan kepustakaan yang sesuai dan mendukung topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Metode Pengumpulan Data diperoleh dari metode Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan bersama narasumber yang disebutkan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan menggunakan format wawancara semi terstruktur, mengumpulkan informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang disertakan dalam pedoman wawancara serta pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara spontan selama wawancara berlangsung. Pertanyaan dan jawaban diajukan pada saat wawancara, dan hasilnya direkam atau direkam dengan alat perekam.

2. Observasi

Observasi yang dimaksud pada studi ini diperoleh dari wawancara dan pertemuan langsung dengan narasumber untuk memahami kebijakan Kawasan cepat tumbuh Segitiga Emas (Surabaya-Malang-Batu) Karangploso.

3. Dokumentasi

Sistem dokumentasi dalam studi ini berupa foto dan/atau dokumen terkait yang diperlukan untuk analisis data dan kesimpulan penelitian.

Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses penetapan, pembagian, pemusatan perhatian pada simplifikasi, abstraksi, dan transformasi data mentah seperti yang tampak dalam catatan tertulis di lapangan. Informasi atau data yang diperoleh di lapangan akan disajikan dalam bentuk penjelasan yang lengkap dan mendetail. Statistik yang diperoleh dari lapangan bisa sangat banyak sehingga perlu didokumentasikan secara cermat dan rinci.

2. Penyajian Data

Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya menurut apa yang dipahami. Dalam studi ini penyajian data berupa deskripsi, foto, atau gambar sejenis. Selain itu, penyajian data yang digunakan untuk menyajikan data adalah teks naratif yang secara langsung memaparkan temuan dan menarik

kesimpulan yang diperoleh peneliti melalui teknik wawancara.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan validasi konstan selama proses penelitian. Kesimpulan yang awalnya disajikan masih tentatif dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun kesimpulan yang disajikan pada tahap awal adalah kredibel jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, kesamaan, dan hal-hal yang berulang dan menyajikannya dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini, observasi dan wawancara digunakan untuk menarik kesimpulan dari berbagai kategori penelitian.

Keabsahan Data

Keabsahan data adalah untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah yang asli dan untuk mengecek data yang diperoleh. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi pengujian, kredibilitas, transferabilitas, reliabilitas, dan verifiabilitas (Sugiyono, 2007).

Untuk menghitung data dari penelitian kualitatif sebagai penelitian ilmiah, validitas data perlu diperiksa. Adapun untuk uji keabsahan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi untuk menguji kredibilitas didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2007).

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Kondisi Lingkungan

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004, daerah menikmati hak-hak berikut dalam proses pemerintahan sendiri: (1) mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di tingkat mereka sendiri; 2) memilih kepala daerah ; 3) mengelola kelembagaan daerah; 4) mengelola kekayaan daerah; 5) memungut pajak dan retribusi daerah; 6) Memperoleh bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di daerah; 7) Memperoleh sumber pendapatan lain yang sah; (8) Memperoleh hak-hak lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengimplementasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati, Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan memasukkan kebijakan tersebut ke dalam rencana strategis yang tertuang

dalam dokumen perencanaan KSCT. Namun, saat ini belum ada dokumen yang memuat maksud dan tujuan yang spesifik dan terperinci yang ingin dicapai oleh kebijakan KSCT, seperti dokumen Master Plan KSCT Kabupaten Malang. Akibatnya, implementasi kebijakan KSCT terkesan tidak tepat sasaran.

Menurut ketentuan di atas, kabupaten atau kotamadya memiliki kewenangan yang luas untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya sendiri. Selain itu, kabupaten atau kota juga diberdayakan untuk merumuskan kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mengarahkan dan mengendalikan wilayah-wilayah strategis dan cepat berkembang di daerah. wilayah.

Dalam rangka merencanakan dan menyokong kemandirian daerah, khususnya penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Cepat (KSCT), dan mengupayakan tercapainya pertumbuhan yang seimbang, maka “Pedoman Penyusunan Master Plan Pertumbuhan Cepat Kawasan Strategis” dirumuskan. Pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Cepat (KSCT) diperlukan, tidak hanya untuk pembangunan daerah itu sendiri, tetapi juga untuk upaya pemberdayaan daerah secara lebih luas. Konsep Pembangunan Wilayah di Kawasan Strategis Pertumbuhan Cepat (KSCT) pada awalnya dikembangkan melalui gagasan pembangunan pusat pertumbuhan, yang kemudian dikembangkan melalui berbagai tahapan menjadi Rencana Pembangunan Kawasan Strategis, yang membahas kawasan dalam penyusunan perencanaan. Pengembangan wilayah di Kawasan Strategis Pertumbuhan Cepat (KSCT) khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Penyusunan Rapid Growth Strategic Territory Development (KSCT) adalah untuk membantu pelaksanaan pembangunan yang lebih sistematis dimana daerah pertumbuhan cepat memerlukan embrio dari pusat pertumbuhan daerah dan dilakukan penataan agar pertumbuhannya dapat dikontrol dan dikendalikan melalui identifikasi. Potensi ekonomi tapak untuk rencana pembangunan daerah strategis.

b. Sumberdaya

Terbitan suatu proyek yaitu keluaran dari kebijakan, sedangkan dampak adalah konteks yang makin lapang, yakni konsekuensi yang dirasakan oleh publik atau kelompok bidikan sebagai imbas atas implementasi politik. Oleh karena itu penerima kebijakan akan menerima hasil berupa program. Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar implementasi kebijakan hanya diarahkan pada pengembangan kawasan wisata. sehingga dampak terbesar dirasakan oleh masyarakat di wilayah

prioritas. Sementara itu, dampak penguatan UMKM belum terlalu besar.

Tujuan kebijakan KSCT sesungguhnya nyaris sama dengan yang tertuang dalam konsep perencanaan. Akan tetapi, ide perancangan KSCT tidak meliputi sejumlah unsur, seperti terlihat atas hasil empiris di lapangan: (1) Keseimbangan kesejahteraan manusia (keterampilan, penyaluran pemasukan nisbi dan kepapaan, pengangguran dan peluang kerja) tidak terukur. Tingkat perkembangan manusia, tradisi dan kelakuan penduduk domestik, (2) perencanaan tidak menitikberatkan pada kebutuhan fundamen individu sebagai tujuan mendasar, tetapi lebih mempertimbangkan pembangunan fisik untuk tujuan pabrikasi dan pemakaian, (3) tidak jelas bagaimana untuk menghasilkan hasil akan ditugaskan, maupun kebijakan untuk memastikan distribusinya, termasuk program aksi dan mekanisme penyaluran untuk mendorong produksi oleh masyarakat miskin, khususnya petani kecil dan pengusaha (4) Strategi pembangunan manusia yang terdesentralisasi belum mencapai keterlibatan masyarakat dan kemandirian yang terbaik; (5) Rencana pembangunan harus mencakup kerangka tenaga kerja untuk menganalisis kinerjanya.

Pengaruh kesenjangan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari dampak negatif pembangunan utama. Tidak tercapainya keselarasan yang menjadi keserasian manusia mungkin disebabkan oleh hasrat dan tujuan pemerintah guna memajukan PAD dan perkembangan perniagaan, unsur yang ikut bertanggung jawab atas kesenjangan tersebut. Hanya daerah dengan prioritas pembangunan yang benar-benar dapat merasakan dampak pembangunan. Sementara itu, daerah-daerah yang pembangunannya belum berjaya nampaknya membutuhkan kesabaran lebih untuk menunggu pembangunan selanjutnya. Strategi pembangunan tidak menitikberatkan pada kepentingan landasan makhluk selaku tujuan penting penjadwalan, tetapi kian menekankan pada pengembangan material untuk produksi dan konsumsi yang dapat dilihat dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan pembangunan daerah yang menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai menjadi daya tarik tersendiri yang dapat membawa manfaat positif bagi warga setempat. Teori Tulligan (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan sangat fungsional dan geografis dalam dua hal, dan pasti memiliki berbagai efek pengganda (*multiplier element*), nilai ekonomi, konsentrisitas geografis, dan properti yang mendorong pertumbuhan di sekitarnya.

Dari segi fungsional, jika pusat-pusat kenaikan berpengaruh di lingkaran konsentris komunitas bisnis atau perwakilan perusahaan, maka dapat mendorong vitalitas perniagaan di dalam dan di luar kawasan. Sementara itu, pertumbuhan geografis bermaksud bahwa pusat-pusat pertambahan mendapat keringanan dan

kesederhanaan untuk menawan berbagai jenis usaha (seperti UMKM), tetapi tidak ada distribusi yang jelas dan terintegrasi di dalam wilayah tersebut. Pada konsepsi KSCT, kejadian ini terlihat dari minimnya analisis konseptual hulu dan hilir. Salah satu penyebab kurangnya pembangunan di hulu adalah pengaruhnya yang besar dan pasar yang sulit. Potensi pasar (hilir) wilayah Karangploso belum dikaji lebih mendalam. Usaha mikro, kecil, dan menengah dapat mendorong masyarakat miskin, terutama petani kecil dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi, yang juga harus diperhatikan dalam pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi Tiongkok Raya. Selain itu, pemerintah harus memiliki kebijakan untuk memastikan produksi dapat didistribusikan, yaitu disediakan dan disediakan ke fasilitas pasar.

Ketimpangan yang muncul antara pengembangan material dan SDM, khususnya pada sektor strategis tumbuh cepat (KSCT), disebabkan perencanaan tidak menitikberatkan pada kebutuhan dasar manusia sebagai tujuan utama perencanaan, tetapi lebih menitikberatkan pada pengembangan material. Masyarakat di kawasan KSCT saat ini sangat perlu berinovasi, melatih dan meningkatkan sumber daya manusianya. Gagasan pengembangan sumber daya manusia sangat penting dalam hal inovasi dan kreativitas, karena harus disertai dengan gagasan pelatihan. Namun, pelatihan dan peningkatan kualitas SDM di wilayah KSCT masih kurang, sedangkan pelaku usaha di wilayah tersebut memiliki akses permodalan seperti bantuan permodalan dari perbankan dan pemerintah. Sehingga pengembangan kawasan sektoral lainnya harus mampu mendukung kawasan KSCT. Jadi, sebegus apapun sarana dan prasarannya, jika hanya sedikit atau sedikit sekali kegunaannya, percuma saja. Suatu daerah tidak dapat berfungsi dengan baik jika infrastrukturnya pun tak menyokong. Seindah apapun mutu seseorang, sonder dukungan fasilitas, bakal rumit untuk mencapai misi yang diinginkan. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai elemen absolut diperlukan guna pembangunan satu daerah. Peraturan yang sangat penting ialah *people oriented*, sehingga kerangka manusia dan ide kebutuhan dasar perlu mengakar dalam rencana pengembangan proyek suatu daerah, khususnya departemen KSCT Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Masyarakat Karang Ploso, Kabupaten Malang.

2. Faktor penghambat dalam Imlementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Faktor Internal

Aspek pembendung dalam penerapan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Malang ialah dependensi potensi manusia. Selain keterbatasan kuantitas potensi manusia, juga kurangnya potensi

manusia yang kompeten untuk kegiatan pengonsolidasian UMKM. Praktisi usaha cemas bersaing secara sehat, dan pelaku usaha yang sudah terjun ke dunia usaha tidak membagikan ilmu yang diperoleh dari pelatihan yang pernah diikuti sebelumnya. Hal ini tentu saja dilandasi ketakutan akan persaingan wirausaha di masa depan. Banyak UMKM yang tidak memiliki izin usaha perdagangan yang merupakan salah satu disinsentif bagi pelaku usaha itu sendiri, seperti ketidakmampuan untuk menjual produknya di pasar modern, pemerintah tidak memiliki kepercayaan terhadap produk, dan sulit untuk menjual produknya di pasar. Alasan tidak diperolehnya izin usaha oleh pelaku komersial adalah prosedur administrasi dan birokrasi rumit dan panjang karena peraturan dan kebijakan ekonomi yang tidak jelas atau tidak pasti. Edward III berpendapat bahwa struktur birokrasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi adalah prosedur operasi standar, dan jika struktur organisasi terlalu terfragmentasi, maka akan melemahkan pengawasan dan menyebabkan birokrasi. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang bergerak sesuai tugas pokok dan fungsi serta peran masing-masing.

b. Faktor Eksternal

Fokus lembaga eksekutif mencakup organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang tepat sesuai dengan agen pelaksana. Hal ini terkait dengan latar belakang kebijakan dari setiap implementasi kebijakan yang membutuhkan pengemban yang gamblang dan disiplin. Pentingnya kapasitas penerapan politik akan paling dipengaruhi dengan karakteristik dan penerapan khusus dari entitas pelaksana. Apakah penempatan jabatan dalam struktur yang dibentuk oleh Dinas Koperasi dan UMKM sudah tepat, orang yang tepat ditugaskan dan diakui ahli di bidangnya, sehingga dapat diketahui tugas pokok dan program fungsional penyelenggaraan kemasyarakatan. kebijakan pemberdayaan melalui UMKM sangat baik.

Dari segi susunan institusi, selaku pengelola politik menyokong kejayaan penerapan pemberdayaan usaha kecil, menengah dan mikro di Kabupaten Malang. Hal ini sejalan dengan Tambunan (2002) dan Wardani et al (2013) bahwa peran pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten adalah melaksanakan, berkolaborasi dan mengkoordinasikan kebijakan pemerintah pusat. Dinas Koperasi Mikro dan Perdagangan memiliki staf yang kompeten dan diakui sebagai ahli di bidangnya, jadi dapat disimpulkan peran utama dan peran kebijakan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan lewat program UMKM.

3. Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

a. Sumber Daya Manusia

Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi manusia, potensi modal dan potensi peralatan yang sangat baik untuk melaksanakan sistem pengonsolidasian masyarakat melalui sistem UMKM. Seperti disebutkan sebelumnya, Peserta sistem UMKM dilatih beragam agenda untuk mengembangkan kemampuannya. Di sisi berlainan, negara telah merancang bujet tersendiri untuk membiayai setiap kepentingan peserta UMKM dan menyediakan pelayanan untuk menyokong kesuksesan program tersebut. Sebagaimana dikemukakan Rosidin (2017: 73-74), daya utama pemberdayaan per rakyat (khususnya eksekutor UMKM) ialah memperkuat atau membangun kapasitas melalui pembangunan manusia, dengan pengembangan usaha memegang peranan krusial sebab bermanfaat bagi masyarakat. atau manfaat. Peningkatan kesejahteraan; pengembangan lingkungan sebagai prasyarat investasi dan pembedahan yang terkait dengan proteksi, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan pengembangan kelembagaan, yang dapat dilaksanakan dengan baik melalui rencana pemberdayaan rakyat Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang Program Perusahaan.

b. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan implementasi kebijakan sebagian besar bergantung pada berbagai alat yang mendukung kebijakan tersebut. Beberapa aspek penunjang terlaksananya agendan pengonsolidasian UMKM adalah infrastruktur. Kesiapan infrastruktur sangat penting untuk memberdayakan UMKM, antara lain tersedianya sarana penunjang, tempat yang nyaman dan strategis, serta sarana penunjang seperti brosur, iklan, press release. Sarana dan prasarana yang ada memang mendukung UMKM dalam mengimplementasikan KSCT. Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat juga sangat tergantung pada ketersediaan dukungan seperti sarana dan prasarana. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang melakukan pendampingan dan penataran yang langsung di bawah tanggung jawab konsultan di Pusat Pelayanan Bisnis Terpadu Kabupaten Malang. Pendanaan diperlukan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan yang berdampak besar pada peningkatan ekonomi lokal. Anggaran ini digunakan untuk merealisasikan proyek-proyek prioritas Kabupaten Malang, termasuk UMKM. Selain pendampingan dan penataran, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang juga menyiapkan packing plant dengan fasilitas lainnya secara gratis agar bisa bersaing dengan arsitektur

yang menawan. Desain bukan hanya tentang membuat bentuk tetapi menimbang-nimbang banyak aspek antara lain unit bursa yang pas, brand image dan unsur apa saja yang hendak dimasukkan dalam paket. Edward III mengatakan bahwa walaupun substansi peraturan dikomunikasikan secara jelas dan konstan, penerapan tidak akan ampuh apabila pengelola kesulitan sumber daya guna mengimplementasikannya. (Subarsono: 2011)

Tentunya ada faktor pendukung dalam setiap pelaksanaannya, serta faktor pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Cepat (KSCT) bagi UMKM. Faktor-faktor yang mendukung tercapainya tujuan yang direncanakan. Kendala merupakan hambatan yang mempengaruhi efektifitas (tingkat keberhasilan) implementasi KSCT untuk pemberdayaan UMKM di Kabupaten Malang, selain itu terdapat juga faktor pendukung implementasi KSCT bagi UMKM di Kabupaten Karangploso Kabupaten Malang.

Namun proses pemberdayaan tidak senantiasa bergerak seperti yang diharapkan, banyak unsur yang membatasi sistem pemberdayaan tersebut, yang pertama adalah sulitnya UMKM untuk mempromosikan produknya di pasar, sehingga tidak melaksanakan atau tidak melaksanakan. Menerima pelatihan yang diajarkan oleh kantor. Koperasi dan UKM. Kedua, dibutuhkan SDM yang baik untuk menilai pelaku UMKM yang tidak mengikuti arahan dinas koperasi, UKM dan perdagangan, serta menjamin kelancaran usaha pelaku UMKM itu sendiri. Alasan ketiga adalah Kabupaten Malang kekurangan lembaga swasta besar seperti hotel, sedangkan pusat perbelanjaan di Kabupaten Malang menyediakan tempat bagi peserta usaha kecil, menengah dan mikro untuk memasok dan memperkenalkan barang. Inhibitor adalah faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan.

Kesimpulan

Menurut perolehan studi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Pengonsolidasian UMKM di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang sangat baik ditinjau dari kondisi lingkungan, dimana pelaksanaan kebijakan KSCT bagi UMKM melibatkan Partisipasi masyarakat khususnya oleh pelaku UMKM. Dilihat dari sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang telah menyiapkan anggaran khusus untuk realisasi program usaha mikro, kecil dan menengah. Pada pelaksanaan rancangan didukung oleh sikap dan komitmen para pelaksana acara. Faktor internal seperti sikap pengurus Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang tentang setiap program yang dilaksanakan dan sikap peserta UMKM yang menerima dan mendukung setiap rancangan yang telah dikembangkan menunjukkan bahwa tindakan pengembangan rancangan Kabupaten Karangploso

adalah cukup bagus. Dan pembuat kebijakan berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tertata dengan baik serta peran masing-masing. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangploso memberikan pelayanan faktor eksternal langsung kepada masyarakat, membantu pengurusan perizinan, akses pendanaan hingga memaksimalkan efektifitas pemasaran.

Pelaksanaannya tentunya tidak lepas dari pengaruh faktor penunjang dan faktor pembendung. Faktor penunjang pelaksanaan agenda pengonsolidasian masyarakat melalui rancangan UMKM adalah potensi manusia dan sarana dan infrastruktur yang baik. Ada beberapa sumber daya yang paling penting untuk melaksanakan rencana, termasuk potensi manusia, potensi alam, potensi keuangan dan potensi pendukung lainnya. Adapun faktor penghambatnya sendiri, banyaknya usaha kecil, menengah, dan mikro yang belum mendaftarkan izin usaha, laporan usaha yang belum stabil, dan tabiat usaha kecil, menengah, dan mikro yang tidak berani bersaing secara sehat. pelaksanaan rencana, serta hambatan sikap komitmen pelaksana program dan sikap pemerintah..

Saran

Berdasarkan temuan kajian implementasi domain strategi pertumbuhan cepat UMKM di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, penulis mengajukan beberapa rekomendasi agar implementasi KSCT dapat berjalan maksimal, antara lain:

1. Menambah jumlah pegawai di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Malang dan Kabupaten Karang Puloso agar pelaksanaan KSCT ini dapat terlaksana dengan lebih efektif.
2. Melakukan advokasi kepada masyarakat luas di kawasan strategis Kabupaten Malang yang berkembang pesat melalui Divisi Kabupaten Malang.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solihin. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Bardach, E. 2008. The Implementation Game. Cambridge: MIT Press
- Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hidayat, M., & Darwin, R. (2017). Analisis Sektor Unggulan Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Media Trend, 12(2), 156–167

- Inu Kencana Syafie. 1999. Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta
- Malangtimes. 2018. Ini Arah Program Kawasan Pertumbuhan Cepat Karangploso. <https://www.malangtimes.com/baca/26365/20180403/094717/ini-arahan-program-kawasan-pertumbuhan-cepat-karangploso>, diakses pada 1 November 2022
- Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Surianingrat, Bayu. 1985. "Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan", Jurnal Elektronik REKAMAN, ISSN : 2598-8107, Volume 1, Nomor 1, November 2017.
- Solichin Abdul Wahab. 2001. Kebijaksanaan, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suryono, Agus. 2010. Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Suryono, Agus, Noor, Tauchid. 2010. Teori-Teori Sosial. Malang: Universitas Negeri Malang
- Tarigan, Robinson. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Willis, Katie. 2005. Theories and Practices of Development. New York: Taylor & Francis e-Library